

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Amirudin, H. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Dimock.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Terjemahan)*. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Pers.
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Edward, J. (2014). *Mastering Strategic Management Evaluation and Execution*. Canada.
- Effendi, M. S. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hndoko, T. H. (1999). *Managemen Edisi 2*. Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta: BPFE.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- mahmudi. (2005). *MANajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Management YKPN.
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mulyasa. (2016). *Revolusi dan Inovasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publii (Teori, Analisis dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Sosial security Development institute.
- Sjahir, a. C. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (1990). *Dimensi-Dimensi Prisma Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijaksanaan Negara dari formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wanto, a. i. (1999). *Analisis Data Kuantitatif (Panduan Praktis untuk Penelitian Sosial): dilengkap dengan Analisis Regresi Nominal dan Ordinal*. Purwokerto: Stain Press: Purwokerto.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Preses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publising.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi (Teori, Model< Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **Jurnal dan Skripsi**

- Chaerunnissa, C. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Brebes . *Studi Kasus Desa Legok dan Tambakserang Kecamatan BAntarkawung*, vol 5.
- dkk, P. U. (2009). Zakat dan Empowering, Evaluasi dan Kaji Dampak Program Layanan Kesehatan Cuma cuma. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, vol 2.

- Institute Of Medicine Of The National Academies Washington DC. (2008). Design Consideration For Evaluating The Impact of Pefpear.
- Kurnia, M. R. (2016). Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan MAngunharjo, Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, vol 4 No 2 Hal 151-159.
- Onny Setany, S. d. (2012). Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Penataan Sanitasi Perkotaan Melalui Program Sanitasi Linglungan Berbasis MAsyarakat di AKbupaten Tulungangung. vol 10 issue 2 : 111-122.
- Sosial, k. (2013). Pelaksanaan Bedah Kampung Melalui rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan. *Jurnal Kesehatan dan Lingkungan*.
- Suradi. (2012). Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Sosial : Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarha Miskin di Kota Banjarmasin. *Jurnal Sosiokonsepsia*, vol 17.
- Susanti, R. (2010). Pemetaan Persoalan Sistem Penyediaan Air Bersih untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Penyediaan Air Bersih di Kota Sawahlunto. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol 21 No 2.
- Wahyudiana, D. d. (2015). Model Evaluasi Program Pendidikan. vol 14 No 1.

### **Lain-Lain**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

Surat Keputusan bupati Banyumas No 050/1444 tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas

Pedoman Umum Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dinas Permukiman